

LAPORAN KINERJA (LKJ)
TRIWULAN II
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019



Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat : Jalan Melati Nomor 17 Telp (0517) 22703 – 21278 Fax (0517) 21081 Kandungan - 71212

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mampu menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Triwulan II Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan kinerja triwulan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kami menyadari capaian realisasi triwulan II ini belum memuaskan karena tidak semua indikator kinerja dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 2 (dua) triwulan, walaupun dengan capaian kinerja triwulan II yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikutnya

Demikain laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Juli 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681010 199603 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD	2
1.3 ISU STRATEGIS	7
1.4 DASAR HUKUM	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	9
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	23
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
BAB IV : PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	13
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2018	14
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	20
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2019	22
Tabel 3.2 Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 3.3 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Triwulan II Tahun 2019	24
Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pada Sekretariat Triwulan II Tahun 2019	34
Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang PAUD dan DIKMAS Triwulan II Tahun 2019	35
Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SD Triwulan II Tahun 2019	36
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SMP Triwulan II Tahun 2019	38
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Kebudayaan Triwulan II Tahun 2019	39

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Sasaran	13
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2019	14
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	20
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2019	22
Tabel 3.2 Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 3.3 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Triwulan II Tahun 2019	24
Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pada Sekretariat Triwulan II Tahun 2019	34
Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang PAUD dan DIKMAS Triwulan II Tahun 2019	36
Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SD Triwulan II Tahun 2019	37
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SMP Triwulan II Tahun 2019	38
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Kebudayaan Triwulan II Tahun 2019	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan capaian kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama SKPD.

Laporan capaian kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan capaian kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Pembentukan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Sekretariat :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat :

1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

e. Bidang Kebudayaan :

1. Seksi Kesenian;
2. Seksi Kebudayaan; dan
3. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

➤ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan serta tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi

barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

2. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan.
3. Sub Bagian keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan

➤ **Bidang Pendidikan Sekolah Dasar**

Bidang Bina Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan, dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

➤ **Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama, mempunyai melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, manajemen

sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.
3. Seksi Sarana dan Prasarana sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana menengah pertama.

➤ **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

Bidang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidik anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyiapkan bahan dan melaksanakan

pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

➤ **Bidang Kebudayaan**

Bidang kebudayaan, mempunyai tugas kebijakan teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Kesenian, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian kesenian rakyat.
2. Seksi Budaya, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian dan penelusuran nilai budaya daerah dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan dan penelusuran sejarah, napak tilas, museum dan kepurbakalaan.

➤ **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1. Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Satuan Pendidikan Daerah.
2. Satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal'
3. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan di bidang pendidikan, Karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis yang disusun dirumuskan dari permasalahan serta tantangan yang di dihadapi ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian, Identifikasi masalah tersebut diatas selanjutnya diidentifikasi, isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
2. Masih rendahnya layanan pendidikan satuan sekolah dasar yang bermutu;
3. Belum terpenuhinya SPM pada satuan sekolah dasar;
4. Masih rendahnya layanan pendidikan satuan sekolah menengah pertama yang bermutu;
5. Belum terpenuhinya SPM pada satuan sekolah menengah pertama;
6. Belum optimalnya upaya Pelestarian bangunan dan benda cagar budaya;
7. Masih rendahnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan mencakup :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan **strategi** atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai **strategi** ini.

Dalam menyusun perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Misi II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

”Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Cerdas, Kompetitif Serta Memiliki Iman Dan Taqwa”

2. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan;
2. Percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
3. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
4. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendidikan yaitu :

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah;
5. Percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
6. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

4. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah;
5. Meningkatnya percepatan pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
6. Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal 2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik 3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik 5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD 6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A 7. Persentase PNF yang terakreditasi 8. Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 11. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar 12. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik 13. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD 14. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar 15. Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 16. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A 17. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar 18. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar 19. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar 20. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 21. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 22. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama 23. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik 24. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP 25. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama 26. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B

			27. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A 28. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama 29. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama 30. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama
2	Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	31. Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi 32. Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi
3	Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	33. Persentase kesenian daerah yang aktif 34. Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara
4	Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	35. Indeks kepuasan masyarakat 36. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 37. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik 38. Persentase mobil operasional laik jalan 39. Persentase mobil dinas laik jalan 40. Persentase kendaraan dinas laik jalan 41. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 42. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA 43. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat 44. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat 45. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu 46. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat

5. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
5. Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar;
6. Memberikan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatkan upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
5. Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar;
6. Peningkatan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan anak usia dini; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama.	Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini; Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama	Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini; Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;	Meningkatnya percepatan pemenuhan SPM	Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar	Mempercepat pemenuhan SPM satuan sekolah dasar Mempercepat pemenuhan SPM satuan sekolah menengah pertama

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Melestarikan bangunan dan benda cagar budaya dan	Meningkatkan upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah
Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Memberikan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Peningkatan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

6. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2019

No	Program/Kegiatan
1	2
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa administrasi kantor
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
	Penyediaan makanan dan minuman
	Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis lainnya
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan Dokumen Keuangan
	Penyusunan Dokumen AKIP
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
	Pembinaan dewan pendidikan
	Seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
	Peringatan Hari Guru
	Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Penambahan ruang kelas sekolah
	Pembangunan gedung sekolah
	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
	Pengadaan meubeler sekolah
	Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa
	Bimbingan Teknis Pendidikan Keluarga
	Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PA
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
	Pengadaan buku-buku dan alat siswa (DAK)
	Program Pendidikan Non Formal
	Penyelenggaraan paket C setara SMU
	Penyelenggaraan paket B setara SMP
	Penyelenggaraan non formal
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK)
	Penyelenggaraan paket C setara SMU/BOP kesetaraan DAK
	Penyelenggaraan paket C setara SMP/BOP kesetaraan DAK
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir
	Pembangunan ruang ibadah
	Pembangunan perpustakaan sekolah
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
	Pengadaan meubeler sekolah
	Pembangunan pagar sekolah
	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa SD
	Pelaksanaan ujian Sekolah (UN) SD
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

	manajemen berbasis sekolah (MBS) si satuan pendidikan dasar
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)
	Pembayaran sarana air bersih dan sanitary (DAK)
	Penyediaan buku pelajaran dan alat tulis untuk SD/MI/SDLB/dan SMP/MA
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (DAK)
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pembangunan ruang ibadah
	Pengadaan meubeler sekolah
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP
	Pelaksanaan Ujian Sekolah (UN) SMP
	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah
	Rehabilitasi ruang kelas sekolah
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)
	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)
	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
	Pembangunan ruang pusat sumber belajar inklusif (DAK)
	Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
	Perkembangan keragaman budaya daerah
	Pembinaan dan pelestarian nilai sejarah dan perjuangan bangsa
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
	Festival budaya meratus
	Festival olaharag tradisional dan permainan rakyat
	Festival karasmin banua
	Festival luar daerah
	Penelolaan permusiuman (DAK)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-

kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Di bawah ini tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 – 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1.	Harapan Lama Sekolah	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
		2.	Rata - Rata Lama Sekolah	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
		3.	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan terakreditasi A}}{\text{Jumlah satuan pendidikan yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.	Persentase PAUD Formal berakreditasi A	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$\frac{\text{Jumlah PAUD Formal berakreditasi A}}{\text{Jumlah PAUD Formal yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		5.	Predikat AKIP	Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi AKIP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Berikut perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 :

TABEL 2.5
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A Persentase PNF yang terakreditasi Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama	75,30% 100% 100% 100% 80 50 lembaga 3 lembaga 100% 100% 100% 100% 100% 80 100% 100% 3 sekolah 2 sekolah 0% 100% 99% 80,29% 100% 100% 80 100% 100% 3 sekolah 2 sekolah

		Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama	0%
		Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama	100%
Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya		Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi	9 bcb
		Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi	13 bcb
Meningkatnya perkembangan kesenian dan hasil budaya daerah		Persentase kesenian daerah yang aktif	11 macam
		Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara	11 macam
Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu		Indeks kepuasan masyarakat	81
		Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	72 macam
		Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	51 macam
		Persentase mobil operasional laik jalan	1 unit
		Persentase mobil dinas laik jalan	1 unit
		Persentase kendaraan dinas laik jalan	300 unit
		Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA	100%
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat	A
		Persentase laporan yang dibuat tepat waktu	3 laporan
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan Laporan Capaian Kinerja Tahun ke lima dari Renstra 2018-2023. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam Renstra.

Laporan kinerja Triwulan II Dinas Pendidikan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realisasi capaian atas indikator kinerja utama adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Triwulan II
Tahun Anggaran 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi	Capaian
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal	%	75,30%	78,63%	104,4%
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100%	100,91%	100,91%
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	99%	93,14%	94,08%
4.	Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100%	98,83%	98,83%
5.	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100%	100%	100%
6.	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100%	100%	100%

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2
Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator
1.	Harapan lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
2.	Rata-rata lama sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$
3.	Persentasi Satuan Pendidikan Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan terakreditasi A}}{\text{Jumlah satuan pendidikan yang ada}} \times 100\%$
4.	Persentasi Paud Formal Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah PAUD Formal berakreditasi A}}{\text{Jumlah PAUD Formal yang ada}} \times 100\%$
5.	Predikat Akip	Hasil Evaluasi Akip

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan II Tahun 2019, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sungai Selatan pada triwulan II sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Triwulan II Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019	Realisasi Triwulan II	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal 2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik 3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik 5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD 6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A 7. Persentase PNF yang terakreditasi 8. Persentase penduduk yang berusia \geq 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 11. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar 12. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik 13. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD 14. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar 15. Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 16. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A 17. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar 18. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar 19. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar 20. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 21. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 22. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama 23. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik 24. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP 25. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama 26. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 27. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A	76,65% 100% 100% 100% 80 50 lembaga 3 lembaga 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80 100% 100% 100% 3 sekolah 2 sekolah 0% 100% 99% 80,29% 100% 100% 80 100% 100% 3 sekolah	78,63% 100% 57,78% 30% - 2 3 98,83% 100,91% 94,29% 82,73% 60% - 87,91% 100% 3 sekolah 4 sekolah 0,15% 74% 93,14% 76,29% 91,14% 77,13% - 82,99% 100% 6 sekolah	104,4% 100% 57,78% 16,25% - - - 98,77% 100,91% 94,29% 82,73% - - 87,91% 100% 3 sekolah 4 sekolah 0% 74% 94,08% 95,02% 91,14% 77,13% - 82,99% 100% 6 sekolah

<p>Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya</p> <p>Meningkatnya perkembangan kesenian dan hasil budaya daerah</p> <p>Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu</p>	28. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah
	29. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama	0%	0,74%	0%
	30. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama	100%	74,11%	74,11%
	31. Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi	9 bcb	6 bcb	22,22%
	32. Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi	13 bcb	9 bcb	7,69%
	33. Persentase kesenian daerah yang aktif	11 macam	11 macam	100%
	34. Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara	11 macam	4 macam	36,36%
	35. Indeks kepuasan masyarakat	81	81,48	81,48
	36. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	72 macam	72 macam	100%
	37. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	51 macam	51 macam	100%
	38. Persentase mobil operasional laik jalan	1 unit	1 unit	100%
	39. Persentase mobil dinas laik jalan	1 unit	1 unit	100%
	40. Persentase kendaraan dinas laik jalan	300 unit	300 unit	100%
	41. Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	42. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA	100%	100%	100%
	43. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%	100%	100%
	44. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat	A	BB	-
	45. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu	3 laporan	3 laporan	100%
	46. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di PAUD dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4 – 6 Tahun dikali 100%. APK PAUD pada triwulan II realisasinya masih di angka 78,63% (Jumlah siswa PAUD usia 4 – 6 tahun 16.275 dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun 22.302). dari target 76,65%.

2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana prasarana PAUD yang ada dikali 100%. Realisasi indikator persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik pada triwulan II sebesar 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah guru yang ada dikali 100%. Realisasi indikator kinerja sebesar 57,78% dari 100% yang ditargetkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya guru yang sudah memasuki usia pensiun sehingga mereka tidak bersedia lagi untuk melanjutkan ke S1.

4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik.

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik PAUD formal yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik PAUD formal dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 30% dari target 100%.

5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD

Angka diperoleh dari hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan nilai kelulusan 80. Realisasi indikator pada triwulan II masih belum ada disebabkan kegiatan test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD masih dalam proses (baru proses pretest).

6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi A dibagi jumlah lembaga PAUD yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 2 lembaga 50 lembaga yang ditargetkan.

7. Persentase PNF yang terakreditasi

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah PNF yang terakreditasi dibagi jumlah PNF yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebanyak 3 (tiga) lembaga dari 3 (tiga) lembaga yang ditargetkan.

8. Persentase penduduk yang berusia \geq 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka ini diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II masih berada pada 98,83% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca 175.073 dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 177.146) dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 98,83%.

9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SD/MI/Paket A dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 100,91% (Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SD/MI/Paket A 25.290 dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun 25.062) dari 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 100,91% .

10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 7 -12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 94,29% (jumlah peserta didik usia 7 -12 tahun 23.630 dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun 25.062) dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 94,29%. Masih ada siswa yang sekolah tidak berdasarkan usia 7 -12 tahun menyebabkan pencapaian APM SD/MI belum terpenuhi.

11. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah tenaga pendidik yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 82,73% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 82,73%.

12. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah tenaga pendidik SD yang ada dikali 100%. Realisasi indikator triwulan II 60% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 60%.

13. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD

Angka diperoleh dari hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan nilai kelulusan 80. Realisasi indikator pada triwulan II masih belum ada realisasi disebabkan kegiatan test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik sekolah dasar masih dalam proses.

14. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah lulusan pada pada jenjang

pendidikan yg lebih rendah. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 87,91% dengan capaian kinerja sebesar 87,91%.

15. Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI dibagi Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 100%.

16. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah dasar yang terakreditasi A dibagi jumlah sekolah yang ada dikali 100. Realisasi indikator pada triwulan II sebanyak 3 sekolah dari 3 sekolah yang ditargetkan..

17. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah hijau yang ada dibagi jumlah sekolah satuan sekolah dasar seluruhnya. Realisasi indikator pada triwulan II sebanyak 4 sekolah dari 2 sekolah yang ditargetkan.

18. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang tidak bersekolah lagi dibagi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang pernah/sedang bersekolah dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 0,15% dari 0% yang ditargetkan.

19. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah IP SPM yang tercapai dibagi jumlah 27 IP SPM. Realisasi indikator triwulan II sebesar 74% dari 100% yang ditargetkan.

20. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SMP/MTs/Paket B (11.255) dibagi jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun (12.084) dikali 100%. Realisasi indikator triwulan II sebesar 93,14% dari 99% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 93,14%.

21. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 13- 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun dikali 100%. Realisasi indikator triwulan II sebesar 76,29% (jumlah peserta didik usia 13- 15

tahun 9.218 dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun 12.084) dari 80,29% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 95,02%.

22. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV (946 orang) dibagi jumlah tenaga pendidik seluruhnya (1.038) dikali 100%. Realisasi indikator triwulan II sebesar 91,14% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 91,14%.

23. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah tenaga pendidik SMP seluruhnya dikali 100%. Realisasi indikator triwulan II sebesar 77,13% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 77,13%.

24. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP

Angka diperoleh dari hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan nilai kelulusan 80. Realisasi indikator pada triwulan II masih belum ada realisasi disebabkan kegiatan test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik sekolah dasar masih dalam proses.

25. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu (2.576 orang) dibagi jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yg lebih rendah (3.104 orang) dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 82,99% dari target 100% dengan capaian sebesar 82,99%.

26. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP/MTs (2.852) dibagi Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMP/MTs Pada Tahun Ajaran Sebelumnya (2.852) dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan

27. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi A dibagi jumlah sekolah menengah pertama

seluruhnya. Realisasi indikator pada triwulan II sebanyak 6 sekolah dari jumlah sekolah 32 buah dengan realisasi sebesar 18,75%.

28. *Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama dibagi jumlah sekolah menengah pertama seluruhnya. Realisasi indikator pada triwulan II sebanyak 2 sekolah.

29. *Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang tidak bersekolah lagi (75 orang) dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang pernah/sedang bersekolah (10.079) dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 75 orang atau 0,74% dari 0% yang ditargetkan.

30. *Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah IP SPM yang tercapai dibagi jumlah 27 IP SPM. Realisasi indikator pada triwulan II sebesar 74,11% dari 100% yang ditargetkan.

31. *Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi dibagi jumlah cagar budaya bangunan yang ada. Realisasi triwulan II sebanyak 6 bcb dari 9 bcb yang ditargetkan dengan capaian kinerja 66.66%.

32. *Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi dibagi jumlah cagar budaya (makam) yang ada. Realisasi triwulan II sebanyak 9 bcb dari 13 bcb yang ditargetkan dengan capaian 69,23%.

33. *Persentase kesenian daerah yang aktif*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kesenian daerah yang aktif dibagi jumlah kesenian daerah yang ada. Realisasi pada triwulan II sebanyak 11 macam dari 11 macam yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 100%.

34. *Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara dibagi jumlah budaya daerah yang ada. Realisasi pada triwulan II sebanyak 4 macam dari 11 yang ditargetkan

35. Indeks kepuasan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didapat dari hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk realisasi indeks kepuasan masyarakat pada triwulan II 81,48%

36. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah peralatan gedung kantor yang ada dikali 100%. Realisasi pada triwulan II 72 macam dari 72 macam yang ditargetkan.

37. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan gedung kantor yang ada dikali 100%. Realisasi pada triwulan II 51 macam dari 51 macam yang ditargetkan.

38. Persentase mobil operasional laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah mobil operasional laik jalan di bagi mobil operasional yang ada dikali 100%. Realisasi triwulan II sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan.

39. Persentase mobil dinas laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah mobil dinas yang laik jalan dibagi jumlah mobil dinas yang ada dikali 100%. Realisasi triwulan II sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan.

40. Persentase kendaraan dinas laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kendaraan dinas yang laik jalan dibagi jumlah kendaraan dinas yang ada dikali 100%. Realisasi triwulan III sebanyak 300 unit dari 300 unit yang ditargetkan.

41. Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian

yang ada dikali 100%. Realisasi indikator triwulan II sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

42. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA. Realisasi indikator triwulan II sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

43. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%. Realisasi indikator triwulan II sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

44. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai evaluasi AKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan pada Tahun 2017 kategori BB dengan nilai 74,44 (sangat baik).

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memperoleh nilai A.

45. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah laporang yang dibuat tepat waktu dibagi jumlah laporan yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan II sebanyak 3 laporan dari 3 laporan yang ditargetkan.

46. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat

Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan harus selalu ditindaklanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk indikator ini harus 100%. Selain persentase tindak lanjut atas

hasil pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sama sehingga mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu melakukan koordinasi yang intensif dengan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kab. HSS.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Bidang Sekretariat :

Tabel 3.4
Alokasi dan Realisasi pada Sekretariat
Triwulan II Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa administrasi kantor	142.785.630	43.010.300
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	336.900.000	60.796.368
3	Penyebarnya informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	19.000.000	-
4	Penyediaan makanan dan minuman	72.830.000	-
5	Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis lainnya	3.683.450.000	1.089.949.081
6	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan.	1.275.626.500	634.770.621
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.325.000	42.625.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	519.500.000	141.857.059
3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000	4.997.000
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.425.000	1.819.650
2	Penyusunan Dokumen AKIP	4.425.000	925.500
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		
1	Pembinaan dewan pendidikan	22.392.000	-

2	Seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	433.370.000	115.670.000
3	Peringatan Hari Guru	144.600.000	-
4	Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah	58.350.000	-
Jumlah		6.846.479.130	2.136.420.579

Program dan kegiatan di sekretariat di dukung dengan dana sebesar Rp. 6.846.479.130 dengan realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp. 2.136.420.579. Selain mendukung kegiatan untuk bidang (Bidang PAUD dan DIKMAS, Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP dan Bidang Kebudayaan) juga mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat;
2. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik;
3. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik;
4. Persentase mobil operasional laik jalan;
5. Persentase mobil dinas laik jalan;
6. Persentase kendaraan dinas laik jalan;
7. Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu;
8. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA;
9. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat;
10. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat;
11. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu;
12. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada secretariat.

2. Bidang PAUD Dan DIKMAS :

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi pada Bidang PAUD Dan DIKMAS
Triwulan II Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
1	Penambahan ruang kelas sekolah	177.500.00	171.143.000
2	Pembangunan gedung sekolah	188.200.000	-
3	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)	216.754.975	-
4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	77.657.850	-
5	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	188.210.000	-
6	Pengadaan meubeler sekolah	114.080.000	-
7	Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa	99.950.000	-

8	Bimbingan Teknis Pendidikan Keluarga	61.975.000	-
9	Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS	16.135.000	-
10	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	1.191.054.000	-
11	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	36.635.000	-
12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PA	210.000.000	-
13	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	78.000.000	-
14	Pengadaan buku-buku dan alat siswa (DAK)	39.000.000	-
	Program Pendidikan Non Formal		
1	Penyelenggaraan paket C setara SMU	204.550.000	-
2	Penyelenggaraan paket B setara SMP	132.460.000	-
3	Penyelenggaraan non formal	121.875.000	-
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK)	1.118.251.175	50.156.500
5	Penyelenggaraan paket C setara SMU/BOP kesetaraan DAK	45.000.000	-
6	Penyelenggaraan paket C setara SMP/BOP kesetaraan DAK	105.000.000	-
	JUMLAH	4.422.288.000	221.299.500

Program dan kegiatan pada bidang PAUD dan DIKMAS didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 4.422.288.000 dengan realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp. 221.299.500. Program dan kegiatan pada bidang PAUD dan DIKMAS mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal;
2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik;
3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV;
4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik;
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD;
6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A.
7. Persentase PNF yang terakreditasi
8. Persentase penduduk yang berusia \geq 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara).

3. Bidang Pendidikan SD :

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pendidikan SD
Triwulan II Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar		

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir	764.450.000	745.867.000
Pembangunan ruang ibadah	324.800.000	174.250.000
Pembangunan perpustakaan sekolah	197.350.000	59.750.000
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	249.900.000	74.750.000
Pengadaan meubeler sekolah	200.610.000	200.110.000
Pembangunan pagar sekolah	372.950.000	371.379.000
Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa SD	408.477.100	254.193.700
Pelaksanaan ujian Sekolah (UN) SD	273.512.500	273.215.000
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	3.367.425.000	519.004.000
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) si satuan pendidikan dasar	8.435.000.000	2.959.700.000
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	1.908.080.000	475.000.000
Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	110.038.000	27.259.500
Pembayaran sarana air bersih dan sanitary (DAK)	261.285.000	64.091.250
Penyediaan buku pelajaran dan alat tulis untuk SD/MI/SDLB/dan SMP/MA	1.004.675.000	-
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	182.970.000	-
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (DAK)	102.697.000	25.424.250
Jumlah	18.164.219.600	6.223.993.700

Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SD didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 18.164.219.600 dengan realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp 6.223.993.700 .Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SD mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
3. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar
4. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD
6. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar
7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A
8. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A
9. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar
10. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar
11. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar

4. Bidang Pendidikan SMP :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pendidikan SMP
Triwulan II Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Pembangunan ruang ibadah	322.900.000	44.886.000
	Pengadaan meubeler sekolah	200.190.000	199.690.000
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	614.750.000	199.538.000
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP	234.025.000	112.300.000
	Pelaksanaan Ujian Sekolah (UN) SMP	598.679.000	566.403.400
	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah	217.250.000	216.938.000
	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	1.179.702.000	217.938.000
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	2.060.600.000	393.625.000
	Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	793.860.000	196.402.500
	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)	1.317.630.000	327.345.000
	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)	1.029.290.000	255.722.500
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	259.900.000	21.200.000
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	263.330.000	-
	Pembangunan ruang pusat sumber belajar inklusif (DAK)	231.840.000	57.467.500
	Jumlah	9.324.446.000	2.809.455.900

Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SMP didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 9.324.446.000 terealisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp. 2.809.455.900 Program kegiatan pada bidang pendidikan SMP ini mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
3. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama
4. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP
6. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama

7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B
8. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A
9. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama
10. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama
11. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama

5. Bidang Kebudayaan :

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Kebudayaan
Triwulan II Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya		
	Perkembangan keragaman budaya daerah	169.405.000	66.350.000
	Pembinaan dan pelestarian nilai sejarah dan perjuangan bangsa	404.466.000	402.771.000
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	712.028.000	180.861.711
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	277.655.000	6.750.000
	Festival budaya meratus	65.072.500	-
	Festival olahrag tradisional dan permainan rakyat	164.232.500	-
	Festival karasmin banua	113.490.000	-
	Festival luar daerah	73.750.000	7.700.000
	Penelolaan permusiuman (DAK)	450.000.000	157.552.000
	Jumlah	2.457.099.000	821.984.711

Program dan kegiatan pada bidang kebudayaan didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 2.457.099.000 terealisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp. 821.984.711 Program dan kegiatan pada bidang kebudayaan mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi;
2. Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi;
3. Persentase kesenian daerah yang aktif;
4. Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Triwulan II yang dapat disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang;
2. Masih ada indikator kinerja sasaran yang tidak didukung oleh program dan kegiatan;
3. Masih ada program dan kegiatan yang tidak mendukung pada indikator kinerja;
4. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Melihat kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dapat diambil langkah - langkah sebagai berikut:

1. Agar menempatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang dibutuhkan;
2. Dalam penyusunan program dan kegiatan harus mengacu pada indikator sasaran strategis;
3. Untuk mempercepat pencapaian indikator sasaran strategis maka harus didukung oleh program dan kegiatan yang mendukung pada indikator sasaran strategis tersebut;
4. Jadwal setiap kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan II Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Oktober 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681010 199603 1 004